

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CBT:
STUDI KASUS EKOWISATA MANGROVE MENGGAPAN DI PROVINSI
RIAU**

Musadad¹, Mariaty Ibrahim², Nurlena³

¹*Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Riau, Pekanbaru,*
sadad.sanusi@gmail.com

²*Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru,* mariatyibrahim@yahoo.com

³*Prodi D3 Perhotelan, Universitas Telkom, Bandung,*
nurlena@tass.telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata Berbasis Komunitas merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk merealisasikan sebuah pariwisata yang berkelanjutan. Akan tetapi, kegiatan pariwisata yang terjadi di Ekowisata Mangrove Mengkapan tidak menunjukkan hasil yang positif setelah pariwisata ini dikelola oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rusaknya fasilitas dan atraksi wisata yang ada, penurunan drastis jumlah wisatawan, dan tidak harmonisnya hubungan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menggali faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan atau keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas di ekowisata mangrove tersebut. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan berbagai stakeholders, termasuk Kepala Bidang Destinasi – Dinas Pariwisata Siak, Tokoh LSM, anggota Pokdarwis, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penghambat dalam poyek CBT di Mangrove Mengkapan yaitu kurang kompaknya pengelola lokal dengan masyarakat desa, pejabat desa, dan Dinas Pariwisata, kurang aktifnya pengelolaan oleh Pokdarwis, rendahnya manfaat ekonomi yang dirasakan, berhentinya bantuan CSR dari perusahaan, dan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah. Penyelesaian masalah-masalah tersebut mendesak untuk segera diselesaikan. Salah satu caranya adalah dengan duduk bersama antar stakeholder dengan masing-masing mengesampingkan egonya.

Kata kunci: penghambat, keberhasilan, CBT, ekowisata, mangrove

ABSTRACT

Community-based tourism (CBT) is one of the approaches employed to realize sustainable tourism. Nevertheless, tourism activities taking place in Mengkapan Mangrove located in Riau Province do not show positive results after the tourism is managed by the local community. This is evidenced by the poorly maintained tourist facilities and attractions, the drastic decline in the number of visitors, and the lack of

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

ISSN No: 2622-7436

harmonious relations between stakeholders. Therefore, the current study was aimed to explore the factors that inhibit the success or sustainability of the CBT project in the mangrove ecotourism. The data was collected by conducting direct observation and interviews with various stakeholders, including the Head of Destination Section of Siak Tourism Office, an NGO Leader, local management members, and villagers. The results of the study suggest that there were several constraints in the CBT project in Mangrove, including a lack of cohesiveness between local managers and villagers, village officials, and Siak Tourism Office, inactive local management, low perceived economic benefit, cessation of CSR assistance from the company, and lack of support from the government. Resolving these problems is urgently needed. One way is to organize a meeting to be attended by all related stakeholders to achieve a common understanding and set of solutions.

Keywords: *constraints, success, CBT, ecotourism, mangrove*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Wilayah terluar ini mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah dalam hal pemerataan ekonomi dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa program-program pembangunan pemerintah saat ini lebih terfokus untuk wilayah-wilayah yang terpencil dan terluar (pesisir), khususnya di luar Pulau Jawa. Terdapat beragam aspek dan potensi dari sebuah wilayah pesisir yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan, salah satunya adalah potensi wisata.

Salah satu potensi wisata pesisir yang dijadikan salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat adalah Ekowisata Mangrove Mengkapan yang terletak di Kecamatan Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahkan Kecamatan Apit sendiri telah dimasukkan ke dalam kluster Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak yang khusus diproyeksikan untuk pengembangan wisata pesisir atau bahari (RIPPDA Kab Siak 2012). Kecamatan Sungai Apit disebut sebagai “kawasan strategis pariwisata IV untuk pengembangan produk pariwisata berbasis Ekowisata dan didukung oleh wisata budaya dalam satu kesatuan tema pengembangan ekowisata cakupan Wilayah Kecamatan Bunga Raya dan Sungai Apit” (Pasal 12 Ayat 2d). Oleh karena itu, destinasi wisata mangrove yang terletak di Kecamatan Sungai Apit ini dicanangkan sebagai ekowisata unggulan Kabupaten Siak dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat.



Gambar 1. Jembatan yang tidak terawat

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Namun pada kenyataannya, Ekowisata Mangrove Mengakapan yang mulai serius digarap pada tahun 2015 ini justru kondisinya sekarang mengalami stagnansi. Memang kegiatan wisata di mangrove ini sempat mengalami kejayaan pada tahun 2016 – 2017 namun setelah itu terjadi penurunan drastis dari sisi kunjungan wisata maupun peran aktif masyarakat. Saat ini kondisi di lapangan bisa dikatakan memprihatinkan terbukti dengan tidak terawatnya fasilitas wisata dan sikap skeptis masyarakat dalam pengelolaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali fenomena tersebut untuk menemukan alasan-alasan di balik berhenti berkembangnya atau tidak *sustainable*-nya Ekowisata Mangrove Mengakapan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community-Based Tourism*) merupakan sebuah pendekatan dalam pariwisata yang mencoba mengakomodir peran serta masyarakat dalam pengelolaan. Goodwin & Santilli (2009) mendefinisikan CBT secara sederhana sebagai pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pariwisata berbasis komunitas, menurut Häusler & Strasdas (2002), memiliki beberapa definisi:

1. CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata;
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga dapat mendapat keuntungan; dan
3. Menuntut pemberdayaan secara politis, demokratisasi, dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Menurut Scheyvens (2002), tujuan akhir dari CBT adalah pemberdayaan masyarakat setempat (*the empowerment of the host community*). CBT dipercaya dapat memberikan manfaat kolektif, menciptakan peluang bagi terciptanya pekerjaan dan usaha skala mikro (Mann, 2000). Namun, CBT juga hadir dengan berbagai resiko. Beberapa studi, misalkan, menemukan bahwa pendapatan yang diperoleh dari CBT relatif kecil dan tata kelola yang buruk (Mitchell & Muckosy, 2008). Peneliti lain juga menemukan kurangnya partisipasi masyarakat lokal (Scheyvens, 2002), potensi konflik antar warga

akibat pembagian keuntungan yang tidak adil/merata (Häusler & Strasdas, 2002), mismanagement pendanaan dan tidak terlibatnya pemangku kepentingan lain (Strydom & Mangope, 2017). Oleh karena itu, Giampiccoli *et al* (2015) menekankan pentingnya peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan pemberdayaan (*empowerment*) dengan didukung oleh advokasi untuk membuat masyarakat mandiri dalam mengantisipasi resiko-resiko kegagalan sebuah proyek pariwisata berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dimana pengambilan data dilakukan dengan melakukan:

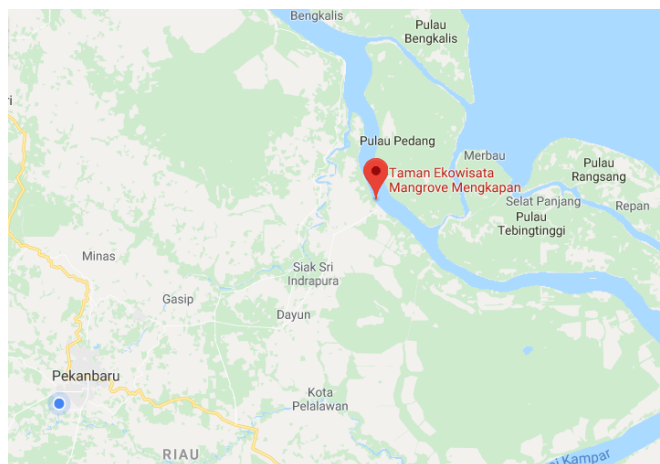
- a. Wawancara dengan *stakeholder* yang paham tentang Ekowisata Mangrove Mengkapan seperti Pengelola dalam hal ini Pokdarwis, Dinas Pariwisata Siak, Tokoh LSM, dan masyarakat lokal;
- b. Observasi langsung untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara langsung kondisi dan situasi eksisting Mangrove Mengkapan. Observasi difokuskan pada aspek fasilitas, atraksi wisata, dan pengelolaan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan tiga proses (Miles & Huberman, 2007) yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Ekowisata Mangrove Mengkapan

Pada awalnya ada seorang warga yang berinisiatif melestarikan kawasan hutang bakau di desanya, Desa Mengkapan. Warga tersebut sekarang menjabat sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Mengkapan). Beliau awalnya menanam pohon bakau di sekitaran selat pada tahun 2000an sehingga sampai saat ini kawasan tersebut sudah rindang dipenuhi pohon bakau. Jadi, kegiatan wisata di Mangrove Mengkapan ini berawal dari usaha konservasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal.



Gambar 2. Peta Ekowisata Mangrove Mengkapan

Sumber: Google Map, 2018

Pada masa selanjutnya sekitar tahun 2015, Mangrove Mengkapan mulai dikenal oleh publik setelah beberapa mahasiswa dari Universitas Riau mengunggah foto-foto Mangrove Mengkapan. Pengunjung semakin banyak berdatangan ke Mangrove tersebut. Karena semakin banyaknya pengunjung akhirnya PT Kondur (sekarang Malacca Strait) yang bergerak di bidang pengeboran minyak menghibahkan jembatan kayu yang tadinya untuk akses pekerja untuk dijadikan fasilitas wisata Mangrove Mengkapan. Beberapa kali, perusahaan ini juga memberikan dana CSR nya untuk perawatan dan pengembangan kegiatan wisata.

Di perkembangan selanjutnya, dari tahun 2016-2017, terjadi pengembangan wisata yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak pengunjung yang datang dan dibuatnya beberapa daya tarik baru seperti Gembok Cinta, papan masuk ekowisata, dan penyediaan perahu untuk berkeliling selat, dan lain-lain. Bahkan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Siak juga turun ke Mengkapan bersama-sama Bupati pada waktu itu untuk mengekspos wisata di Mangrove Mengkapan sekaligus melakukan upaya promosi. Tidak hanya itu, pihak Dinas juga memberikan pelatihan kepada pengelola Ekowisata Mangrove Mengkapan.

Kondisi saat ini, sayangnya, kegiatan wisata di Mengkapan bisa dibilang stagnan atau tidak berkembang. Fasilitas seperti jembatan kayu tidak terawat dan kurang aktifnya para anggota Pokdarwis dalam mengelola kegiatan wisata yang ada. Hal ini juga diperparah dengan berhentinya bantuan dana dari PT Malacca Strait karena perusahaan ini telah menghentikan aktifitas pengeborannya sebagai akibat anjloknya harga minyak dunia tahun 2016.

Pemangku Kepentingan Kunci di Ekowisata Mangrove Mengkapan

Mulai awal berkembangnya Ekowisata Mangrove Mengkapan, lalu sempat mengalami masa kejayaan, hingga sekarang terjadi penurunan aktifitas, tidak bisa dipisahkan dari para pemangku kepentingan yang ada disana. Berikut adalah pemangku kepentingan kunci dalam Ekowisata Mangrove Mengkapan.

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
Pihak Dinas Pariwisata, khususnya Bidang Destinasi, telah memfasilitasi promosi dengan mengundang Bupati Siak mengunjungi Mangrove Mengkapan pada tahun 2016. Kegiatan ini diekspos di media-media saat itu. Selain itu, Pihak Dinas juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada Pokdarwis yang ada.
2. Pokdarwis Desa Mengkapan
Sebagai pengelola wisata Mangrove Mengkapan, Pokdarwis Desa Mengkapan telah melakukan banyak hal seperti promosi melalui media sosial, membangun fasilitas wisata, menjaga atraksi wisata, dan mengelola kunjungan wisatawan. Untuk konsumsi para pengunjung, anggota Pokdarwis yang membuka warung sebelum masuk lokasi wisata.
3. Masyarakat Desa Mengkapan
Masyarakat lokal berperan dalam ikut membantu anggota Pokdarwis dalam hal pembangunan fasilitas atau kerja bakti di lokasi wisata. Mereka juga menyediakan lahan parkir ketika banyak pengunjung yang datang.
4. PT. Malacca Strait.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak memainkan peranan yang cukup penting bagi pengembangan ekowisata mangrove mengkapan. Pada awal berkembangnya wisata, perusahaan ini menghibahkan jembatan kayu yang biasa digunakan oleh karyawannya untuk kegiatan wisata. Tidak hanya disitu, perusahaan ini juga beberapa kali memberikan dana CSR-nya untuk Mangrove Mengkapan seperti penanaman pohon bakau. Bisa dikatakan, dana operasional pengelolaan wisata di Mangrove Mengkapan sedikit banyak disokong oleh perusahaan ini.

5. LSM

Terdapat beberapa LSM yang bergerak di Ekowisata Mangrove Mengkapan, namun yang paling berpengaruh adalah PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat). Kegiatan mereka selain melakukan penanaman mangrove dan promosi, juga melakukan advokasi seperti penyadaran pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Ekowisata Mangrove Mengkapan

Menurut Goodwin & Santilli (2009), terdapat dua kriteria keberhasilan sebuah proyek CBT, yaitu kepemilikan/pengelolaan masyarakat dan manfaat bagi masyarakat (*community ownership/management and community benefit*). Sedangkan menurut Asker et al (2010), agar CBT dapat berkelanjutan maka masyarakat harus berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pengembangan wisata (*community members must participate in and benefit from tourism development*). Hal yang terjadi di lapangan adalah pengelolaan sudah dilakukan oleh Pokdarwis, namun tidak mendapat dukungan dari masyarakat, pamong desa, bahkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Siak. Dari sisi manfaat, dengan adanya ekowisata mangrove, hal yang paling diraskan manfaatnya adalah dari sisi manfaat secara ekologis, misalnya hutan bakau menjadi lebih lestari dan indah karena orang-orang lokal tidak lagi menebang kayu bakau. Namun demikian, dari sisi manfaat ekonomi, masyarakat belum terlalu merasakannya, walaupun segelintir orang (anggota Pokdarwis) sudah merasakannya.

Dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada serta observasi langsung di lapangan, terdapat beberapa faktor atau alasan penghambat keberhasilan atau keberlanjutan Ekowisata Mangrove Mengkapan.

1. Tidak kompaknya anggota Pokdarwis dengan masyarakat dan perangkat desa

Ketidakkompakan ini terjadi akibat beberapa faktor diantaranya kecemburuan masyarakat akibat dominasi para anggota pokdarwis dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, mereka yang membuka warung, menyediakan perahu wisata, mengurus parkir adalah anggota Pokdarwis. Masyarakat hanya dilibatkan ketika ada kerja bakti. Akhirnya, masyarakat sekarang mulai tidak mau bekerjasama dengan Pokdarwis ketika ada kerjabakti seperti memperbaiki jembatan, membersihkan pinggiran hutan bakau, dan lain-lain. Akibatnya, fasilitas utama yaitu jembatan trekking akhirnya terbengkalai. Ketidakkompakan yang kedua adalah antara Pokdarwis dan Pejabat Pemerintah Desa. Ketidakkompakan ini terjadi akibat pihak pemerintah desa tidak mau turun dan aktif terlibat ketika Pokdarwis belum mendapatkan legalitas. Sebagaimana diketahui, sampai

saat ini Pokdarwis Desa Mengkapan belum mendapat SK Pembentukan dari Dinas Pariwisata Siak.

Ketidakkompakan warga masyarakat merupakan penghambat dalam kesuksesan sebuah projek CBT. Oleh karena itu, dalam studinya, Ellis & Sheridan (2015) dengan mantab mengatakan bahwa “*CBT is best achieved in a cohesive community*” (CBT dapat berhasil secara optimal dalam sebuah masyarakat yang kompak). Dua hal penyebab kurangnya kerjasama antara pihak-pihak internal desa tersebut harus segera diselesaikan. Salah satu cara adalah berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar.

2. Berhentinya upaya-upaya pengembangan dan fasilitasi oleh Dinas Pariwisata Siak

Wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Siak menunjukkan bahwa sebenarnya pihak Dinas sangat serius dalam mengembangkan wisata yang ada di Mangrove Mengkapan. Buktinya, seperti kata Kabid Destinasi, Dinas telah mengundang Bupati Siak untuk mengunjungi Mangrove Mengkapan sebagai salah satu usaha promosi wisata hutan bakau tersebut serta telah memfasilitasi pelatihan pengelolaan wisata kepada para pengelola mangrove di Kabupaten Siak. Akan tetapi, pihak Dinas Pariwisata enggan “membantu” pengembangan dan pengelolaan wisata di Mengkapan dengan alasan para pengurus/anggota Pokdarwis kurang responsif terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Akhirnya, sekarang Dinas Pariwisata sudah tidak lagi melirik Ekowisata Mangrove Mengkapan. Akibatnya sampai sekarang, tidak ada retribusi yang diterapkan di ekowisata tersebut. Hal ini berbeda dengan Ekowisata Mangrove yang baru dikembangkan (yaitu Mangrove Mekar Jaya) yang sudah mulai diterapkan retribusi.

3. Kurang aktifnya Ketua Pokdarwis Desa Mengkapan

Hasil wawancara dengan Kabid Destinasi dan tokoh LSM mengonfirmasi bahwa ketua Pokdarwis Mengkapan kurang aktif dalam mengelola pariwisata di Mangrove Mengkapan. Mereka beralasan bahwasanya Ketua Pokdarwis terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Kepala Sekolah sehingga kurang perhatian dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan maupun pengembangan. Secara implisit, Kontogeorgopouloset *al* (2014) menyimpulkan bahwa kunci sukses sebuah projek CBT ada tiga yaitu *role of luck, external support, dan local leadership*. Dalam hal ini, kepemimpinan lokal di Ekowisata Mangrove kurang efektif. Jadi, sebuah CBT harus memiliki pemimpin untuk memobilisasi anggotanya untuk aktif mengelola dan mengembangkan pariwisata di desanya.

4. Berhentinya pasokan bantuan CSR dari perusahaan

Berhentinya bantuan dana CSR dari PT Malacca Strait mulai terjadi akibat berhentinya kegiatan perusahaan yang berakibat pada PHK besar-besaran karyawan perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia pada tahun 2016. Semenjak berhentinya aliran dana CSR dari perusahaan tersebut, nyaris masyarakat kelimpungan dalam mencari dana operasional. Sebagaimana diketahui, sementara ini pemasukan dari wisata hanya berasal dari parkir saja karena tidak ada retribusi. Oleh

karena itu, bantuan dana dari perusahaan berperan penting bagi kelangsungan pariwisata di Mangrove Mengkapan.

5. Rendahnya manfaat ekonomi dari kegiatan wisata

Berbagai literatur, misalnya Strydom & Mangope (2017), Dangi & Jamal (2016), Dodds *et al* (2016), dan Scheyvens (2002), menyebutkan bahwa pariwisata berbasis komunitas harus memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat setempat. Bahkan Scheyvens (1999) berpendapat bahwa proyek CBT dianggap berhasilnya jika masyarakat lokal memiliki kontrol dan berbagi manfaat (ekonomis) secara adil. Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa beberapa anggota Pokdarwis mendapat manfaat secara ekonomi, namun masyarakat secara umum tidak. Ada dua penyebabnya, yaitu 1) tidak adanya retribusi sehingga revenue yang didapat sangat sedikit yaitu dari parkir kendaraan saja dan 2) mereka yang mendapat akses terhadap kegiatan ekonomi seperti membuka warung atau menyediakan perahu wisata hanyalah anggota Pokdarwis. Jadi bisa dikatakan, manfaat ekonomi masyarakat secara umum tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

6. Munculnya pesaing sesama ekowisata mangrove

Terdapat ekowisata mangrove baru yang lokasinya tidak terlalu jauh dari mangrove Mengkapan, yaitu Ekowisata Mangrove Menkar Jaya. Ekowisata Mangrove baru ini diresmikan pada tahun 2015 oleh Bupati Siak. Karena dukungan penuh dari Pihak Pemerintah, sampai saat ini ekowisata ini bisa dikatakan jauh lebih maju dari Mengkapan. Sebagai ilustrasi, saat ini sudah diterapkan retribusi sebesar 10rb untuk dewasa dan 5rb untuk anak-anak. Para pemandunya juga baru-baru ini mendapatkan pelatihan sertifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Siak.

Secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran ekowisata mangrove baru telah mempengaruhi pengembangan dan keberhasilan Ekowisata Mangrove Mengkapan. Dari pihak pemerintah, misalnya, mereka lebih fokus mengembangkan mangrove Mekar jaya daripada Mengkapan. Tentu saja hal ini berdampak secara psikologis bagi warga Desa Mengkapan dalam arti semangat mereka untuk mengembangkan wisata di desanya menurun karena tidak diperhatikan oleh pemerintah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan atau keberlanjutan CBT di Ekowisata Mangrove Mengkapan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masing-masing pihak mempunyai argumen sendiri mengenai siapa yang paling bertanggungjawab terhadap mundurnya kegiatan wisata di ekowisata mangrove tersebut. Selain itu, faktor penghambat lain yang adalah rendahnya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, munculnya pesaing, dan berhentinya aliran bantuan CSR dari perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, solusi paling awal yang harus dilakukan adalah semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar bersama dengan mengesampingkan ego masing-masing. Kalau tidak, maka kondisi Ekowisata Mangrove Mengkapan akan semakin memburuk.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebuah proyek CBT tetap tidak boleh menyepelekan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi masyarakat dimana proyek tersebut berada karena ini merupakan magnet yang sangat kuat untuk menarik masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Namun, perlu

**National Conference of Creative Industry:
Sustainable Tourism Industry for Economic Development**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

ISSN No: 2622-7436

diingat pembagian keuntungan harus dilakukan secara merata dan transparan. Selain itu, hal yang juga sangat berpengaruh adalah kekompakan (*cohesiveness*) antar pemangku kepentingan khususnya adalah pengelola lokal, masyarakat lokal, dan pemerintah dalam hal ini Dinas yang bersangkutan.

REFERENSI

- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N. & Paddon M. (2010). *Effective community based tourism: A best practice manual*. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tourism working group. Australia: Sustainable tourism cooperative research centre.
- Dangi, T.B. & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to “Sustainable Community-Based Tourism.” *Sustainability*, MDPI, Open Access Journal, vol. 8(5), pp 1-32
- Dodds, R., Ali, A., Galaski, K. (2016). Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 1–22.
- Ellis, S. & Sheridan, L. (2015). The role of resident perceptions in achieving effective community-based tourism for least developed countries. *Anatolia: an international journal of tourism and hospitality research*, 26 (2), 244-257
- Giampiccoli, A., Jugmohan, S., & Mtapuri, O. (2015). Characteristics and Policies of Community-Based Tourism in the Case of Jamaica. *Caucasus Journal of Social Sciences – Business and Economics*, 45-70
- Goodwin, H. & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? *ICRT Occasional Paper No. 11*
- Häusler, N. & Strasdas, W. (2002). *Training Manual for Community-based Tourism*. Leipzig: InWent
- Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Tourism Planning & Development*, 11(1), 106 – 124
- Mann, M. (2000). *The Community Tourism Guide*. London: Routledge.
- Miles & Huberman. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Mitchell, J., & Muckosy, P. (2008). *A misguided quest: Community-based tourism in Latin America*. London: Overseas Development Institute.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20, 245-249
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Harlow: Pearson Education Limited
- Strydom, A.J. & Mangope, D. (2015). Economic sustainability guidelines for a Community Based Tourism Project: The Case of Thabo Mofutsanyane, Free State Province. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Vol 6 (3) pp. 1-17